

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TH. 1978

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI  
MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Th. 77;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Nomor 037/W dan Nomor 36 Tahun 1970;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1977 (Disempurnakan).
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor: B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

BAB I

KELOMPOKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1). Madrasah Tsanawiyah adalah unit pelaksanaan teknis di bidang Pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2). Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, di samping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk perpustakaan dan laboratorium.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Guru-guru;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk perpustakaan dan laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Kepala Sekolah.

## Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan Praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

## Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat 1 pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

BAB III  
TATA KERJA

## Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 10

Melaksanakan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

## Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang tersebar di 26 Propinsi.

BAB V  
PENUTUP

## Pasal 12

Penyimpangan atau suasan Organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

## Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

td.

H. A. MURTI ALI